

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Kerangka Regulasi :

1. UU No 23 Tahun 2014
2. PP No 2 Tahun 2018
3. Permendagri 100 Tahun 2018

Adalah : Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. **Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. **(UU 23 Tahun 2014)**

No	Pembagian Urusan SPM	No	Perangkat Daerah Pengampuh
1	Pendidikan	1	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	2	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Dinas PU dan Pekerjaan Umum
4	Perumahan dan Pemukiman	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
6	Sosial	8	Dinas Sosial

Rujukan Regulasi Teknis SPM

No	Perangkat Daerah Pengampuh	Regulasi Rujukan
1	Dinas Pendidikan	Permendikbud 32 Tahun 2018
2	Dinas Kesehatan	Permenkes No 4 Tahun 2019
3	Dinas PU dan Pekerjaan Umum	Permen PUPR 29 Tahun 2018
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Permen PUPR 29 Tahun 2019
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 121 Tahun 2018
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 101 Tahun 2018
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	Permendagri 114 Tahun 2018
8	Dinas Sosial	Permensos No 9 Tahun 2018

AMANAT SPM DALAM UU 23 TAHUN 2014

Pasal 18 ayat (1 s.d 3):

- (1) Penyelenggara Pem. Drh memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pem Wajib yg berkaitan dg Pelayanan Dasar
- (2) Pelaksn Pelayanan Dasar pd Urusan Pem Wajib yg berkaitan dg Pelayanan Dsr berpedoman pd Standar Pelayanan Minimal yg Ditetapkan oleh Pem. Pst
- (3) Ketentuan lbh lanjut mengenai mengenai SPM diatur dalam PP



UU
23/2014



Pasal 298 ayat (1) & (3) :

- (1) Belanja Drh diprioritaskan utk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg Ditetapkan dg spm
- (3) Belanja Drh utk pendanaan Urusan Pem yg mnjd kewenangan drh selain sbgm dimaksud ayat (1) berpedoman pd analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar (UU 23 2014)



KEPASTIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

❖ **BAPPEDA** memastikan :

- Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. ✓
- **Perangkat Daerah** Memprioritaskan Anggaran Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

❖ **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** memastikan anggaran Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.



Mapping Program SPM dalam Dok Perencanaan Daerah

No	Urusan SPM	Perangkat Daerah Pengampuh	Jumlah Program SPM	Jumlah Kegiatan SPM
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	3	14
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	71
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PU dan Pekerjaan Umum	2	6
4	Perumahan & Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2	2
5	Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1	3
6	Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	9
7	Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	1	5
8	Sosial	Dinas Sosial	5	9
		Jumlah	29	119

SPM PENDIDIKAN

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS PENDIDIKAN		
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
3, Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM KESEHATAN

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS KESEHATAN		
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Balita .	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar .	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif .	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut .	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat .	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis .	Persentase penduduk terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
12, Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah .	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas PU PR
Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas PU PR

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
2, Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM PERUMAHAN PEMUKIMAN

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman
Program Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah .	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
2, Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM KETENTERAMAN & KETERTIBAN (SAT POL PP)

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (%)	Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Program dan Indikator Kinerja 1, Targetnya 100% Setiap Tahun

SPM (PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja 1,
Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM (PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program Pelayanan Informasi rawan bencana .	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
3, Targetnya 100% Setiap Tahun**

SPM (PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS SOSIAL		
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti .	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti .	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti .	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti .	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota .	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial

**Jumlah Program dan Indikator Kinerja
5, Targetnya 100% Setiap Tahun**

Nama Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DINAS PENDIDIKAN		
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
DINAS KESEHATAN		
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Balita .	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar .	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif .	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut .	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan

Integrasi SPM Dalam Perencanaan Palopo

Dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2018-2013 terdapat 29 Program Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan SPM :

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Nama Program
Dinas Pendidikan	3	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .3. Program Pendidikan Kesetaraan
Dinas Kesehatan	12	<ul style="list-style-type: none">Program Pelayanan Kesehatan Ibu HamilProgram Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adalah : Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. **Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. **(UU 23 Tahun 2014)**

UU 23 Tahun 2014, SPM Terdiri Dari 6 Urusan :

1. Pendidikan
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial



Perangkat Daerah Pelaksana/Pengampuh (8 OPD)

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan uUum dan Penataan ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. BPBD, 6. Satpol PP, 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
8. Dinas Sosial

- Nama Perangkat Daerah/Program/Kegiatan Pengampuh SPM Perangkat Daerah Penanggung Jawab DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN** Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) . Dinas Pendidikan Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Dinas Pendidikan Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Dinas Pendidikan Pengadaan pakaian seragam sekolah Dinas Pendidikan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara Dinas Pendidikan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Pelaksanaan pendidikan gratis Dinas Pendidikan Pelaksanaan ujian akhir sekolah Dinas Pendidikan Penyediaan sarana dan prasarana SD dan MI Dinas Pendidikan Penyediaan sarana dan prasarana SMP dan MTs Dinas Pendidikan Penyediaan sarana dan prasarana SKB Dinas Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Pendidikan Pelaksanaan penyediaan pendidikan non operasional Dinas Pendidikan **DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran Ibu Hamil Kegiatan Pemeriksaan Kehamilan Kegiatan Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kegiatan Rujukan ANC **Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran Ibu Bersalin Kegiatan Pelayanan Persalinan Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kegiatan Rujukan Pertolongan Persalinan **Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran Bayi Baru Lahir Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Bayi Baru Lahir Kegiatan Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir **Program Pelayanan Kesehatan Balita . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran Balita 0-59 Bulan Pemberian Pelayanan Kesehatan Balita Pencatatan dan Pelaporan **Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar . Dinas Kesehatan** Pendaftaran anak usia pendidikan dasar Kegiatan Pra penjarangan Kegiatan Pelaksanaan penjarangan kesehatan Kegiatan Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjarangan kesehatan Kegiatan Pencatatan dan pelaporan **Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif . Dinas Kesehatan** Kegiatan Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku Kegiatan Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku Kegiatan Pelatihan teknis petugas kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM Kegiatan Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web Kegiatan Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama Kegiatan Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM Kegiatan Monitoring dan evaluasi **Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran Lansia Kegiatan Screening Kesehatan Lansia Kegiatan Pemberian Buku Kesehatan Lansia Kegiatan Pelayanan Rujukan Lansia Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan **Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pendaftaran penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP Kegiatan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP Kegiatan edukasi diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi Kegiatan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi Kegiatan Pelatihan teknis pelayanan kesehatan hipertensi dan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis web Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi **Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus . Dinas Kesehatan** Kegiatan pendaftaran penderita DM menurut wilayah kerja FKTP Kegiatan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP Kegiatan edukasi diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi Kegiatan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi Kegiatan Pelatihan teknis pelayanan kesehatan DM dan surveilans DM berbasis web Kegiatan Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi **Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat . Dinas Kesehatan** Kegiatan Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa Peningkatan pengetahuan SDM Penyediaan form pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial) Monitoring dan Evaluasi **Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis . Dinas Kesehatan** Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM TB Kegiatan Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB Kegiatan Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung Kegiatan Rujukan Kasus TB kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut Kegiatan Jejaring dan kemitraan pelayanan TB Kegiatan Pemantapan mutu layanan laboratorium TB untuk penegakan diagnosis TB Kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi **Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) . Dinas Kesehatan** Kegiatan Pemetaan kelompok sasaran Kegiatan Penyiapan SDM Kegiatan Promosi/penyuluhan Kegiatan Jejaring kerja dan kemitraan Kegiatan Sosialisasi HIV Kegiatan Pemeriksaan HIV Kegiatan Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi **DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah . Dinas PU PR** Pengelolaan Data dan Informasi Layanan Pengelolaan Air Minum Dinas PU PR Penyediaan Pelayanan Dasar Air Minum Dinas PU PR Monitoring Evaluasi Kinerja Pengelolaan Air Minum Dinas PU PR **Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik . Dinas PU PR** Pengelolaan Data dan Informasi Layanan Pengelolaan Air Limbah Penyediaan Pelayanan Dasar Air Limbah Monitoring Evaluasi Kinerja Pengelolaan Air Limbah **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Program Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman** Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman **Program Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah . Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman** Pengelolaan/pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Khusus dan Rumah Susun Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman **DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Ketenteraman dan Tertib Umum Satuan Polisi Pamong Praja** Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran Perda Pengendalian Kantrantibmas dan Tindak Kriminal Penyusunan Kebijakan Ketenteraman dan Tertib Umum **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan **Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran . Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan** Layanan respon cepat (*Response Time*) *penanggulangan kejadian kebakaran* Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Informasi rawan bencana . BPBD** Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana BPBD Pemantauan, Penyebarluasan dan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Bencana Alam BPBD **Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana . BPBD** Sosialisasi Penanggulangan Bencana BPBD Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam BPBD Pelatihan TRC BPBD Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Bencana Alam BPBD **Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana . BPBD** Pengadaan Logistic dan Obat - Obatkan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara BPBD Penyiapan dan Penyeluran Kebutuhan Dasar Terhadap Kebutuhan Korban Bencana BPBD Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam BPBD **DINAS SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti . Dinas Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti . Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti . Dinas Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti . Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti . Dinas Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti . Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tunjau Suci, Khusyus Galangan dan Demam di luar panti . Dinas Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Tunjau**